

POLITICAL WILL WALIKOTA DALAM MEMUTUS PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PEKANBARU

Adlin¹, Erman Muchtar², Sofyan Hadi³

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: Adlin@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Political will walikota pekanbaru menarik untuk digambarkan disebabkan jumlah warga yang terindikasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pekanbaru sejak bulan maret 2020 sampai Oktober 2020 melonjak tajam. Telah ada political will Walikota Pekanbaru yang secara nyata dapat dilihat dari inisiatif dan pilihan kebijakan yang dibuat guna memutus penyebaran Covid-19 tersebut. Sebanyak 12 kebijakan yang terdiri dari peraturan, edaran dan keputusan telah dibuat oleh Walikota Pekanbaru namun kasus positif Covid-19 cenderung naik fluktuatif. Ini artinya inisiatif kebijakan yang dibuat Walikota belum efektif memutus penyebaran Covid-19. Artikel ini bertujuan menggambarkan inisiatif kebijakan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru serta menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil tersebut belum efektif memutus penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Dokumen terkait dikumpulkan, dilakukan reduksi data, kemudian dilakukan proses penyajian data dan penarikan kesimpulan menggunakan literatur yang dikemukakan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif dan pilihan kebijakan Walikota Pekanbaru belum efektif disebabkan faktor individu walikota terkesan lengah dan panik menghadapi wabah Covid-19. Kemudian faktor organisasi pemerintah kota Pekanbaru yang belum memiliki lembaga dan prosedur teruji menghadapi bencana. Selanjutnya adalah faktor lemahnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah kota dan munculnya kebingungan di tengah masyarakat disebabkan kebijakan terkait Covid-19 yang seringkali diubah oleh pemerintah kota Pekanbaru. Terakhir adalah faktor sosial yaitu adanya kebijakan pemerintah pusat dinilai sangat mempengaruhi walikota dalam membuat kebijakan. Dampaknya kebijakan yang dibuat walikota cenderung meniru kebijakan pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat fokus kebijakannya terkait Covid-19 lebih kuat ke bidang ekonomi dibandingkan bidang kesehatan.

Kata Kunci: *Political will, Walikota, Covid-19.*

ABSTRACT

The political will of the Mayor of Pekanbaru is interesting to describe because the number of residents indicated as positive for the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru from March 2020 to October 2020 jumped sharply. There has been a political will from the Mayor of Pekanbaru, which can be seen from the initiatives and policy choices made to stop the covid-19 spread. The Mayor has made 12 policies consisting of regulations, circulars and decisions of Pekanbaru, but positive cases of Covid-19 tend to fluctuate. This phenomenon indicates that the policy initiatives made by the Mayor have not been effective in stopping the spread of Covid-19. This article aims to describe the policy initiatives made by the Mayor of Pekanbaru and analyze the factors that influence the policies taken that have not been effective in breaking the spread of Covid-19 in Pekanbaru City. The research method uses a qualitative approach by using a literature study. Relevant documents were collected, data reduction was carried out, then the process of presenting data and drawing conclusions using the literature presented by experts. The results show that the initiatives and policy choices of the Mayor of Pekanbaru have not been effective due to the individual factor of the major being caught off guard and panicking in the face of the Covid-19 outbreak. Then the element of Pekanbaru city government organization does not yet have proven institutions and procedures for dealing with disasters. Next is the aspect of weak public trust in the city government and the emergence of confusion in the community due to policies related to Covid-19, which the Pekanbaru city government often changes. The last is the social factor, namely the existence of central government policies that influence the major in making policies considerably. As a result, the policies made by the major tend to imitate the policies of the central government. In contrast, the central government focuses on Covid-19 more strongly in the economic sector than in the health sector.

Keywords: *Political will, Mayor, Covid-19*

PENDAHULUAN

Political will pemerintah level nasional maupun lokal sangat diperlukan untuk memutus penyebaran Corona Virus Disease -2019 (Covid-19). (Authers, 2020) berpendapat bahwa wabah Covid-19 merupakan ujian setidaknya terhadap dua hal yaitu *political will* pemerintah dan kemampuan lembaga kesehatan menangani pandemi. *Political will* pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat seringkali lemah padahal *political will*

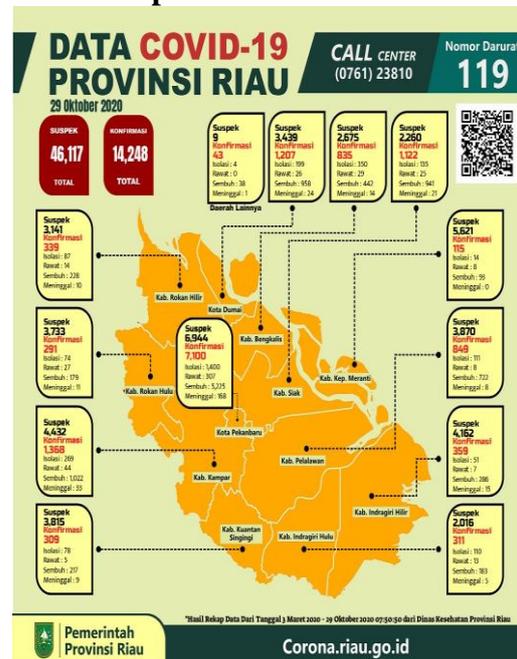
pemerintah sangat diperlukan guna meningkatkan kesehatan masyarakat (Endler et al., 2021). *Political will* pemerintah sangat diperlukan dalam pelacakan dan pengendalian penyebaran Covid-19 (Farzanegan et al., 2021). *Political will* pemerintah yang berani melakukan tindakan politik guna mengurangi tingkat kematian akibat Covid-19 sangat diperlukan (Guest et al., 2020).

Penyebaran Covid-19 cepat, sulit dikendalikan dan mematikan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan Cina dan

kematian yang disebabkan virus ini menurut pejabat kesehatan di Cina menunjukkan virus corona baru 20 kali lebih mematikan daripada virus influenza biasa, yang mengakibatkan ribuan orang terinfeksi (tempo.co, 2020b). Infeksi virus corona di seluruh dunia telah menembus 8,1 juta kasus dengan kematian lebih dari 444.300, menurut data John Hopkins University hingga 17 juni 2020, kematian tertinggi terdapat di Amerika Serikat sebanyak 116.000 orang, disusul Brasil dengan 45.000 orang. Di Indonesia, jumlah orang yang meninggal akibat infeksi virus corona setidaknya 2.276. Adapun kasus Covid-19 hingga 17 Juni 2020 tercatat 41.400 atau bertambah 1.031 kasus dalam 24 jam. Dalam tiga hari terakhir, penambahan kasus harian selalu di atas angka 1.000 (Bbc.com, 2020). Covid-19 telah menyebar ke seluruh propinsi di Indonesia termasuk di Riau, sebagaimana di tunjukan data Gugus Tugas Covid-19 Propinsi Riau terdapat 1.687 orang pasien dalam pengawasan, 175 orang diantaranya meninggal kemudian terdapat 128 kasus positif corona, 6 orang meninggal dunia (covid19.riau.go.id, 2020).

Covid-19 juga telah menyebar di kota Pekanbaru, dan Pekanbaru merupakan daerah dengan kasus Covid-19 terbanyak dibandingkan kabupaten kota lainnya di Riau. Data jumlah kasus Covid-19 di Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 1 berikut

Gambar 1 : Jumlah Kasus Covid-19 di Propinsi Riau Tahun 2020

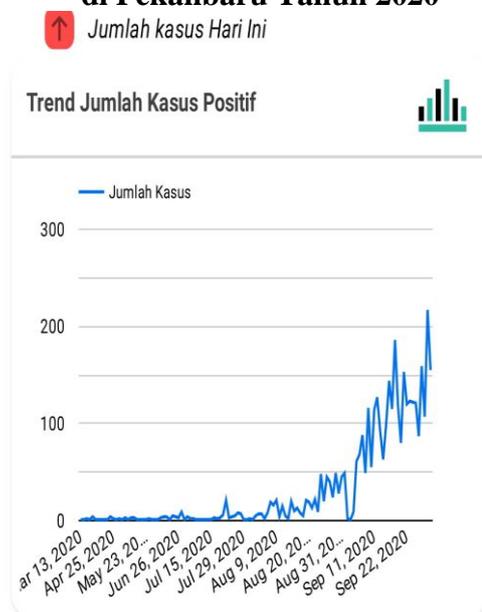


Sumber Data : Tim Gugus Tugas Covid-19 Propinsi Riau (covid19.riau.go.id, 2020)

Berdasarkan gambar. 1 dapat dilihat bahwa di kota Pekanbaru terdapat 6.944 Orang dengan kategori suspek Covid-19, sebanyak 7.100 orang terkonfirmasi positif covid-19, terdapat 1.400 orang isolasi, pasien dalam perawatan 307 orang dan sebanyak 168 orang diantaranya meninggal dunia.

Penyebaran covid-19 di kota Pekanbaru mengkhawatirkan, selain dengan jumlah kasus terbanyak se propinsi Riau, data kasus baru positif Covid-19 terlihat melonjak naik. Data perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Pekanbaru tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :

Gambar 2 : Tren kasus Positif Covid-19 di Pekanbaru Tahun 2020



Sumber Data : Tim Gugus Tugas Covid-19 Pekanbaru (ppc-19.pekanbaru.go.id, 2020)

Berdasarkan gambar 2. Dapat dilihat bahwa perkembangan kasus baru covid-19 di Pekanbaru masih berlangsung fluktuatif namun cenderung naik tinggi. Perkembangan kasus positif tetap harus diwaspadai, sebab menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), penularan COVID-19 cenderung bertambah secara eksponensial, yakni bertambah dua kali lipat dari kasus sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat jika tidak ditangani pemerintah dengan baik (mediaindonesia.com, 2020). Selain itu negara yang telah menurunkan kasus Covid-19, dan dilakukan relaksasi malah mengalami lagi lonjakan kasus baru yang dikenal dengan gelombang kedua virus corona, di antaranya

China(tempo.co, 2020a). Bahkan menurut ahli epidimologi Universitas Indonesia, di Indonesia bisa juga terjadi gelombang kedua Covid-19, akibat mobilitas masyarakat yang tinggi di masa pandemi Covid-19 baik mobilitas antar negara, maupun mobilitas masyarakat antar wilayah di dalam negeri (okezone.com, 2020).

Political will walikota sangat diperlukan guna memutus penyebaran Covid-19 di kota Pekanbaru yang dalam kondisi jumlah kasus positif yang terus bertambah. Adapun konsep *political will* atau kemauan politik biasanya disebutkan berhubungan dengan pusat kekuasaan, dan dikaitkan dengan para pengambil keputusan politik sebagai aktor utama dalam pemerintahan yang baik(Asim Mujkić, 2015).

Penelitian Campbell (2010) menemukan bahwa *political will* pemerintah nasional dan pemerintah lokal sangat menentukan kesuksesan pencegahan penyebaran HIV-AIDS di negara Uganda. Bahkan *political will* pemimpin lokal ditemukan lebih menentukan dalam menyelesaikan masalah, sebab merekalah yang menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan nasional. *Political will* pemerintah lokal dapat mendukung bahkan juga merusak capaian yang diinginkan pemerintahan nasional.

Penelitian Ilesanmi et al., (2021) juga menemukan lemahnya *political will* pemerintah negara bagian Kwara di negara Nigeria dalam upaya memutus penyebaran Covid-19. Tenaga

kesehatan belum mendapatkan dukungan penyediaan alat pelindung diri yang memadai apabila menangani pasien Covid-19. Hal ini menimbulkan ancaman penyebaran Covid-19 ke tenaga kesehatan di negara bagian tersebut.

Penelitian Shumba et al. (2020) juga menemukan lemahnya *political will* pemerintah negara Zimbabwe dalam memutuskan penyebaran Covid-19 di negara itu. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dibuat belum berupaya memperbaiki fasilitas kesehatan, akan tetapi malah menganggap Covid-19 serangan dari negara lain.

Penelitian Akseer et al. (2020) menyatakan bahwa *political will* pemerintah penting dalam memutuskan penyebaran Covid-19. Pemerintah perlu memastikan bantuan gizi, bantuan ekonomi dan jaringan pengaman sosial bagi pasien yang menjalani isolasi akibat terpapar Covid-19.

Salah satu indikator utama adanya *political will* pemerintah adalah adanya inisiatif pemerintah tersebut membuat kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah (Shiffman, 2003). Jika dinilai dari indikator tersebut maka terlihat bahwa inisiatif kebijakan yang dibuat pemerintah kota pekanbaru ternyata belum manjur memutuskan penyebaran Covid-19 di Pekanbaru. Selain jumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Pekanbaru cukup banyak, namun dalam pelaksanaannya seringkali diubah dengan kebijakan yang baru. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat kota Pekanbaru. Dua

fenomena menunjukkan adanya kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataan yang terjadi terkait *political will* walikota pekanbaru dalam memutuskan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu *political will* merupakan masalah dalam penelitian ini yang ingin dibahas oleh tim peneliti.

Sejalan dengan itu, penelitian Adlin & Yusri (2020) juga menemukan Walikota Pekanbaru terlihat belum optimal mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya dalam rangka memutuskan penyebaran covid-19 di kota Pekanbaru. Contohnya ada kebijakan Walikota Pekanbaru yang diterapkan tetapi kemudian dihentikan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang awalnya diterapkan di kecamatan Tampan, selanjutnya diperluas pemberlakuannya pada tiga kecamatan lainnya. Kebijakan ini dinilai tidak mampu membuat angka pasien covid menurun, akhirnya PSBM di Kota Pekanbaru pun resmi dihentikan(sonora.id, 2020). Selanjutnya Walikota Pekanbaru juga membuat kebijakan Tentang Perilaku Hidup Baru (PHB) yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat (PHB) Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (riau.suara.com, 2020). Berubahnya kebijakan dalam rentang waktu yang singkat, menandakan kebijakan yang dipilih dan dibuat dianggap belum

mampu menjawab permasalahan jumlah warga yang positif Covid-19 terus naik. Berdasarkan fenomena yang diuraikan tersebut, maka penelitian ini ingin fokus membahas dan menggambarkan *political will* Walikota Pekanbaru pada indikator inisiatif kebijakan yang diambil dalam memutus penyebaran Covid-19 di kota Pekanbaru tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Velsor et al. (2009) berpendapat bahwa kemampuan pemimpin pemerintahan merupakan salah satu aktor kunci sukses tidaknya penyelesaian masalah yang ada di tengah masyarakat. Pemimpin pemerintahan harus punya kemampuan untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Kapasitas politik ini merujuk pada sejauhmana kekuatan dan ketepatan pemerintah membuat keputusan dan formulasi kebijakan dan proses implementasi kebijakan (Capano, 2020). Oleh karena itu kapasitas pemimpin diperlukan untuk mengatasi Wabah Covid-19, terutama *political will* pemimpin pemerintahan. Brinkerhoff mendefinisikan *Political will* sebagai keinginan dan komitmen pemerintah untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan dan untuk mempertahankan biaya dari tindakan tersebut seiring waktu. Ini juga berhubungan dengan advokasi politisi untuk mempromosikan perubahan (Habtewold & Bilail, 2019). Kemauan politik akan ada ketika sejumlah pembuat keputusan yang memadai dengan pemahaman bersama tentang

masalah tertentu dalam agenda formal berkomitmen mendukung solusi kebijakan yang secara umum dipersepsikan dan berpotensi efektif (Habtewold & Bilail, 2019).

Komitmen politik juga telah sering disebut sebagai kondisi yang sangat penting untuk mengamankan pengurangan risiko dan ketahanan terhadap bencana (Lassa et al., 2019). *Political will*, koordinasi, perencanaan merupakan komponen kunci untuk menguatkan respon negara pada kondisi darurat kesehatan publik dan bencana di Amerika Latin dan negara di Karibia (Ugarte et al., 2018). Demikian juga kemauan politik dan komitmen politik penting dalam membuat kemajuan di bidang kesehatan dan harus dinyatakan sebagai mandat hukum dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memastikan peningkatan pendanaan publik untuk perawatan kesehatan untuk kepentingan semua warga (Aregbeshola, 2017).

Political will pemerintah dapat diukur dengan beberapa indikator. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 Komponen *Political will* yaitu : 1) Inisiatif Pemerintah; 2) Pilihan kebijakan/ Program; 3) Mobilisasi para Pihak; 4) Komitmen Publik dan Alokasi Sumberdaya; 5) keberlanjutan usaha; 6) Belajar dan Beradaptasi (Adlin & Yusri, 2019). Dalam bukunya yang lain Brinkerhoff mengemukakan indikator *political will* sebagai berikut : 1) Inisiatif pemerintah; 2) Kemampuan menganalisis ; 3) Mobilisasi para pihak; 3) Komitmen publik dan alokasi

sumberdaya; 4) Keberlanjutan usaha; 5) Penerapan sanksi yang kredibel; 6) Belajar dan beradaptasi (Martínez & Kukutschka, 2014).

Kemudian Brinkerhoff lebih lanjut berusaha untuk menjelaskan bangunan *political will* dengan mengidentifikasi pengaruh aktor individu, organisasi, sosial-ekonomi dan sistem pemerintahan, dan kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung bangunan *political will* pemerintah (Lassa et al., 2019). Sejalan dengan Brinkerhoff, Martínez & Kukutschka (2014) berpendapat bahwa bangunan *political will* berhubungan dengan 4 hal yaitu : 1) faktor individu berupa keyakinan, aspirasi, motivasi, nilai yang dianut individu yang memerintah; 2) faktor organisasi berupa aturan, budaya, praktek praktek yang terlembaga dan prosedur akan berpengaruh pada *political will* aktor pemerintah; 3) faktor relasi, berupa rasa saling percaya antar aktor akan berpengaruh terhadap *political will* pemerintah; 4) faktor sosial yang terkait kondisi sistem politik dan kondisi perangkat negara.

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan tersebut. Penulis memilih menggunakan pendapat Martinez dan Kukutschka yang mengidentifikasi 4 faktor yang berhubungan dengan *political will* yaitu Individu pembuat kebijakan, organisasi, relasi dan faktor sosial. Pendapat Martinez dan Kukutschka lebih detail variabelnya sehingga lebih mudah untuk dioperasionalisasikan dalam

mengungkap masalah yang terjadi di kota Pekanbaru. Pendapat tersebut juga dapat membantu tercapainya tujuan penelitian ini yang ingin membahas inisiatif kebijakan yang dipilih oleh Walikota Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi belum efektifnya kebijakan yang telah dibuat. Salah satu contoh faktor lingkungan sosial misalnya berupa adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pengendalian Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah seperti walikota pekanbaru. Hal ini terkait dengan dasar hukum pengambilan kebijakan di daerah biasanya akan merujuk kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif sejalan dengan pendapat Cobetta dalam Adlin (2013) bahwa metode kualitatif bertujuan memberikan pemahaman mendalam pada fenomena tertentu yang diteliti dalam suasana alami. Kemudian ketersediaan data yang akan dianalisis lebih banyak berupa dokumen, sedangkan jumlah subjek penelitian terbatas sehingga tidak representatif menurut kaidah statistik. Penelitian kualitatif dapat dilakukan secara terbuka dengan melakukan interaksi antara temuan lapangan dengan teori selama proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan

adalah buku-buku referensi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan *political will* pemerintah. Selain itu dokumen lainnya yang digunakan adalah sumber artikel dari website internet berasal dari media online yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya terkait *political will* walikota pekanbaru memutus penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN Inisiatif dan Pilihan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru

Brinkerhoff sudah menjelaskan bahwa salah satu indikator *political will* adalah adanya inisiatif pemerintah.

Pemerintah kota pekanbaru sudah berinisiatif membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian diimplementasikan guna memutus penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Memutus Covid 19 Tahun 2020

No	Kebijakan
1	Surat Edaran bernomor 800 / BPKSDP-PKAP/640/2020 itu mengatur atau terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
2	Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/Setda-Tapem/661/2020 tentang tindaklanjut pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3	Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2020 tentang pembentukan tim

	gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam Penanganan Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru
5	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru
6	Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/1198/2020 tentang Penyesuaian Sistem kerja Aparatur Sipil Negara
7	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru
8	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
9	Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 502 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kecamatan Tampan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
10	Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 526 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kecamatan Marpoyan Damai, Bukit Raya dan Payung sekaki Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
11	Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 510 Tahun 2020 tentang pembentukan tim tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru
12	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 180 tahun 2020 Tentang Pedoman Isolasi Mandiri Pasien terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 Tanpa Gejala dan Gejala Ringan

Sumber data : Website Pekanbaru.go.id

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat ada 12 kebijakan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru guna memutus penyebaran Covid-19 mulai bulan maret sampai dengan oktober 2020. Mayoritas kebijakan berbentuk

Peraturan Walikota sebanyak 5 buah. Selanjutnya berbentuk 4 kebijakan berbentuk surat keputusan Walikota dan 3 kebijakan berbentuk surat edaran. Hal yang menarik adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan merupakan revisi terhadap kebijakan yang dibuat terkait Covid-19 di tahun yang sama :

1. Perubahan kebijakan tentang tim penanganan Covid-19. Perubahan dari tim gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi tim tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 510 Tahun 2020 tentang pembentukan tim tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru. Perbedaan terletak pada tugas pokok dan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 yang sudah dibentuk yang dipimpin langsung oleh Walikota Pekanbaru selaku ketua satuan tugas yang fokus pada upaya penanganan dan pencegahan dengan merangkul seluruh komunitas untuk bekerja sama mengkampanyekan Gerakan Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, Menghindari Keramaian (4M) dengan tujuan utama perubahan perilaku (mediacenter.riau.go.id, 2020).
2. Perubahan kebijakan yang mengatur pola hidup masyarakat. Dimulai dengan inisiatif Walikota pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/Setda-Tapem/661/2020 tentang tindaklanjut pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru(pekanbaru.go.id, 2020a). Kemudian edaran ini diubah dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam Penanganan Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru(katakabar.com, 2020). Kemudian Walikota Pekanbaru mengubah kebijakan membuat kehidupan masyarakat menjadikan kebiasaan normal yang baru (*new normal*) melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru(zonapekan.com, 2020). Kemudian karena angka kasus positif Covid-19 di

Pekanbaru kembali naik, Walikota kembali menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(pekanbaru.go.id, 2020b). Disebabkan kebijakan pembatasan berskala mikro kurang berhasil maka walikota mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru(pekanbaru.go.id, 2020c).

Faktor Yang Berpengaruh pada Inisiatif dan Pilihan Kebijakan Faktor Individu

Martínez & Kukutschka (2014) berpendapat adanya *political will* berhubungan faktor individu berupa keyakinan, aspirasi, motivasi, nilai yang dianut individu yang memerintah. Inisiatif dan pilihan kebijakan yang dipilih pemerintah kota pekanbaru guna memutus penyebaran covid-19 tentunya tidak bisa dilepaskan sikap individu yang menentukan kebijakan dalam hal

ini walikota. Sejak awal penyebaran Covid-19 di kota Pekanbaru, individu yang berpengaruh dalam membuat kebijakan terlihat kurang waspada atau lengah dan panik menghadapi penyebaran Covid-19. Sikap lengah tersebut sudah terlihat ketika tidak ada persiapan serius pemerintah kota mengantisipasi penyebaran virus corona ke daerah ini sebelum kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pertama terdeteksi di Pekanbaru tanggal 19 maret 2020. Padahal pemerintah kota Pekanbaru sudah diingatkan berbagai pihak agar tanggap, diantaranya Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani melihat virus corona yang telah masuk dan mengancam masyarakat Indonesia, meminta Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait bergerak cepat untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi. Politisi PKS ini meminta Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama dinas terkait juga untuk mengambil langkah antisipasi, mengingat mobilitas masyarakat di Pekanbaru tinggi. Di Kota Pekanbaru terdapat penerbangan internasional, maka pemerintah kota mesti tanggap bersama instansi terkait membuat standar operasional penanganan kasus virus corona dengan cepat (halloriau.com, 2020b).

Inisiatif dan kewaspadaan Walikota Pekanbaru justru muncul dan menguat setelah gubernur Riau mengumpulkan seluruh bupati dan walikota se-Riau guna merespon virus corona mewabah dan mengkhawatirkan semua pihak di Indonesia. Pemerintah

provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota membentuk gugus tugas dalam rangka percepatan penanganan virus corona di Bumi Lancang Kuning. Pembentukan gugus tugas yang diketuai langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar tersebut dilakukan dalam rapat terbatas bertempat di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga meminta para bupati/wali kota agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa terkait situasi dan kondisi saat ini, diharapkan masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menghindari keramaian dalam bentuk apapun guna mengurangi penyebaran virus jika ada yang positif (riaupos.jawapos.com, 2020b).

Sikap Walikota terlihat kembali kurang waspada atau lengah setelah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dinilai berhasil dan terburu-buru menerapkan kebijakan *new normal* yang mengakibatkan kasus positif Covid-19 kota Pekanbaru kembali melonjak tajam. Penerapan *new normal* di Pekanbaru malah lebih dahulu diterapkan padahal petunjuk teknisnya belum ada. *New normal* mulai diterapkan pada tanggal 27 Mei sedangkan aturan diterbitkan tanggal 29 Juni 2020. Penerapan *new normal* hanya berbekal pemberitahuan oleh presiden bahwa Pekanbaru menjadi salah satu kota percontohan dari enam kabupaten/kota di Riau yang menerapkan hidup normal baru (republika.co.id, 2020b). Padahal berbagai pihak sudah mengingatkan

pemerintah kota jika *new normal* diterapkan maka kasus covid-19 dikhawatirkan melonjak. Politisi PAN Pekanbaru Zulfi misalnya mengkhawatirkan perilaku masyarakat melakukan aktivitas dengan tatanan baru yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sementara pengawasan dari pemerintah dilakukan dengan tidak ketat (riaonline.co.id, 2020a).

Faktor Organisasi

Martínez & Kukutschka (2014) berpendapat bahwa faktor organisasi berupa aturan, budaya, praktek praktek yang terlembaga dan prosedur akan berpengaruh pada *political will* aktor pemerintah. Organisasi pemerintah kota Pekanbaru terlihat belum terlatih dan belum memiliki prosedur terlembaga menghadapi bencana sehingga pilihan kebijakan yang diambil terdapat berbagai kekurangan. Hal ini terlihat dari kebijakan anggaran yang belum memadai untuk mengatasi Covid-19, Pemerintah kota Pekanbaru termasuk yang menganggarkan penanganan Covid-19 dibawah 5 persen sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan daerah ini menangani Covid-19 (infoanggaran.com, 2020). Ada banyak keluhan berbagai pihak terhadap masih adanya berberbagai kelemahan dalam penerapan berbagai kebijakan Covid-19 kota Pekanbaru. Diantaranya adalah keluhan masyarakat terhadap penyaluran bantuan bahan pokok bagi warga yang terdampak Covid-19. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan di kota

Pekanbaru disertai pembagian bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak, namun pendataan penerima bansos yang tidak akurat, pendistribusian yang tidak teratur (riaikontras.com, 2020). Ternyata banyak warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah kota Pekanbaru, padahal warga tersebut sudah terdata sebagai warga Pekanbaru (goriau.com, 2020).

Selain itu pemerintah kota juga terlihat gagap mempersiapkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 di Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengeluhkan keterbatasan mendapat Alat Pelindung Diri (APD), yang akan dipakai petugas kesehatan dalam menanggulangi wabah COVID-19 di wilayah setempat. Padahal tim kesehatan harus terus melakukan penanganan pencegahan virus COVID-19 di Kota Pekanbaru bersama tim gugus tugas (halloriau.com, 2020a). Hal ini mengakibatkan sebanyak 40 tenaga kesehatan terpapar virus corona sampai bulan agustus 2020, lebih dari 30 orang tenaga kesehatan pemerintah kota dan sisanya dari rumah sakit swasta terpapar Covid-19 di Pekanbaru (halloriau.com, 2020a). Bahkan pemerintah kota Pekanbaru mengaku kekurangan tenaga kesehatan untuk menangani pasien corona karena lonjakan kasus positif covid-19 di Pekanbaru. Adapun tenaga kerja yang diperlukan adalah dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tim analisis (fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com, 2020).

Faktor Relasi

Martínez & Kukutschka (2014) berpendapat faktor relasi, berupa rasa saling percaya antar aktor akan berpengaruh terhadap *political will* pemerintah. Dalam konteks kota Pekanbaru tentunya faktor relasi berwujud rasa saling percaya antar aktor akan berpengaruh terhadap *political will* walikota Pekanbaru. Fakta menunjukkan bahwa sebagian masyarakat seakan tidak peduli dengan aktivitas pemerintah kota Pekanbaru melalui kebijakan kebijakannya guna memutus penyebaran Covid-19. Dalam masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar misalnya banyak masyarakat yang belum paham mengapa rumah ibadah dilarang beraktivitas sedangkan mall dan pertokoan tetap di buka (riaupos.jawapos.com, 2020a). Sosialisasi kebijakan PSBB kota Pekanbaru dinilai lamban, padahal masyarakat perlu wadah informasi yang terpercaya dengan narasi yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami misalnya berbentuk panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid melalui surat edaran pemerintah kota, ini bertujuan memudahkan warga untuk bertindak lebih awal dalam penanggulangan covid 19 (riaonline.co.id, 2020b). Kemudian munculnya kebijakan berupa pembatasan masyarakat berskala mikro juga membuat masyarakat banyak yang kebingungan. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat yang ditegur aparat pemerintah kota karena beraktivitas

tidak mengikuti protokol kesehatan tanpa mengenakan masker. Mereka seakan tidak peduli dengan kondisi COVID-19 saat ini (news.detik.com, 2020).

Faktor Sosial

Martínez & Kukutschka (2014) menyatakan bahwa faktor sosial yang terkait kondisi sistem politik dan kondisi perangkat negara akan berpengaruh terhadap *political will* pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inisiatif dan pilihan-pilihan kebijakan Walikota Pekanbaru sangat bergantung pada arahan-arahan dari pemerintah pusat. Sementara arah kebijakan pemerintah pusat menurut sebagian orang lebih berdimensi ekonomi dibandingkan dimensi kesehatan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantonno mengatakan bahwa para pengusaha sebenarnya sudah siap melaksanakan *lockdown* atau karantina total pada April lalu. Sebab pihaknya pun ingin penyebaran Covid-19 dihentikan, namun pemerintah tidak mau mengambil langkah *lockdown* karena dikhawatirkan berdampak pada masalah ekonomi (beritasatu.com, 2020). Salah seorang anggota DPR RI, mengatakan bahwa anggaran untuk bidang kesehatan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran bidang ekonomi. Kebijakan seperti itu terus berjalan hingga penanganan corona memasuki bulan keenam. Langkah pemerintah yang segera melakukan antisipasi untuk pemulihan ekonomi nasional cukup bagus, tapi jangan lupa

bahwa penanganan kesehatan juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dipikirkan (kabar24.bisnis.com, 2020).

Kebijakan yang dibuat pemerintah pusat juga cenderung berubah ubah sehingga pemerintah daerah juga kebingungan berinisiatif dan membuat kebijakan di daerah. Pemerintah daerah meminta pemerintah pusat konsisten dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19. Daerah menilai kebijakan pemerintah pusat kerap berubah-ubah dan membuat gamang dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona sekaligus membingungkan masyarakat secara umum (republika.co.id, 2020a). Pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten, terlihat dari pernyataan pejabat membuat masyarakat kebingungan, mulai dari pernyataan mudik yang berbeda dengan pulang kampung, kemudian juga ada penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan tidak lama berselang, pemerintah sudah mewacanakan pelonggaran PSBB tanpa didukung oleh data yang akurat, data penerima bantuan sosial yang tidak akurat sehingga bermasalah dalam penyalurannya (pikiran-rakyat.com, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inisiatif dan pilihan kebijakan yang dibuat oleh Walikota pekanbaru guna memutus penyebaran Covid-19 cukup banyak namun

memiliki berbagai kekurangan. Hal ini disebabkan secara individu Walikota terkesan lengah, panik dan cenderung menunggu instruksi pemerintahan di atasnya sebelum membuat kebijakan. Sementara itu kebijakan pemerintah pusat tidak konsisten sering berubah dan belum teruji secara jitu menghadapi Covid-19. Sikap Walikota yang cenderung menunggu arahan pemerintah pusat berdampak pada kebijakan yang dibuat Walikota juga berubah ubah sehingga kebijakan tersebut tidak efektif memutus penyebaran Covid-19 di kota Pekanbaru. Selain itu secara organisasi pemerintah kota Pekanbaru belum memiliki lembaga dan prosedur yang tertata sehingga tidak siap menghadapi bencana covid-19. Lebih jauh lagi relasi dan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah kota juga terbatas disebabkan sebagian masyarakat bingung dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat dan masyarakat cenderung tidak peduli dengan berbagai kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial* (Issue February 2013). Pekanbaru: Alaf Riau.
- Adlin, & Yusri, A. (2019). *Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar*. 18(2) 117–128.
- Adlin, A., & Yusri, A. (2020). Penegakan Hukum Pemerintahan : Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.71-81>
- Akseer, N., Kandru, G., Keats, E. C., & Bhutta, Z. A. (2020). COVID-19 pandemic and mitigation strategies: Implications for maternal and child health and nutrition. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112(2), 251–256. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa171>
- Aregbeshola, B. S. (2017). Enhancing political will for universal health coverage in Nigeria. *MEDICC Review*, 19(1), 42–46. <https://doi.org/10.1590/medicc.2017.190100010>
- Asim Mujkić. (2015). Political Will: a Short Introduction Case Study - Bosnia and Herzegovina. In *Friedrich Eberi Stiftung*.
- Authers, J. (2020). How Coronavirus is Shaking up the Moral Universe. *The Ethics of Pandemics*.
- Bbc.com. (2020). *Virus corona: Gejala Covid-19, penyebaran,*

- penanganan, pengobatan dan penyembuhan*. Diakses 3 maret 2020. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51232803>
- Beritasatu.com. (2020). *Penanganan Covid-19, Pemerintah Dianggap Cenderung Utamakan Ekonomi Dibanding Kesehatan*. Diakses 5 September 2020. diakses dari <https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/nasional/673207/penanganan-covid19-pemerintah-dianggap-cenderung-utamakan-ekonomi-dibanding-kesehatan>
- Campbell, C. (2010). Community Mobilisation Special Issue - Political Will , Traditional Leaders And African Case Study Aids Care. *Taylor & Francis (Rouledge)*, 22(2), 1637–1643.
- Capano, G. (2020). Policy design and state capacity in the COVID-19 emergency in Italy: if you are not prepared for the (un)expected, you can be only what you already are. *Policy and Society*, 39(3), 326–344. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1783790>
- Covid19.riau.go.id. (2020). *Laporan Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)*. Diakses 3 maret 2020. diakses dari <https://covid19.riau.go.id/pantauan-laporan>
- Endler, M., Al-Haidari, T., Benedetto, C., Chowdhury, S., Christilaw, J., El Kak, F., Galimberti, D., Garcia-Moreno, C., Gutierrez, M., Ibrahim, S., Kumari, S., McNicholas, C., Mostajo Flores, D., Muganda, J., Ramirez-Negrin, A., Senanayake, H., Sohail, R., Temmerman, M., & Gemzell-Danielsson, K. (2021). How the coronavirus disease 2019 pandemic is impacting sexual and reproductive health and rights and response: Results from a global survey of providers, researchers, and policy-makers. *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*, 100(4), 571–578. <https://doi.org/10.1111/aogs.14043>
- Farzanegan, M. R., Gholipour, H. F., Feizi, M., Nunkoo, R., & Andargoli, A. E. (2021). International Tourism and Outbreak of Coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis. *Journal of Travel Research*, 60(3), 687–692. <https://doi.org/10.1177/0047287520931593>
- Fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com. (2020). *Pasien Positif Corona Terus Meroket, Pekanbaru Kekurangan Tenaga Kesehatan*. Diakses 9 September 2020. diakses dari <https://fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com/pekanbaru/pr->

41729365/pasien-positif-corona-
terus-meroket-pekanbaru-
kekurangan-tenaga-kesehatan

pekanbaru-127450-2020-03-23-
diskes-pekanbaru-keluhkan-
keterbatasan-adp-untuk-
tanggulangi-wabah-corona.html

Goriau.com. (2020). *Banyak warga Tak Terima bansos dipekanbaru, termasuk janda 7anak, kejati riauancam pidana mati pemain dana covid19*. Diakses 2 Juni 2020. diakses dari <https://www.goriau.com/berita/baca/banyak-warga-tak-terima-bansos-di-pekanbaru-termasuk-janda-7-anak-kejati-riau-ancam-pidana-mati-pemain-dana-covid19.html>

Halloriau.com. (2020b). *Pemko Diminta Tanggap Cegah Virus Corona di Pekanbaru*. Diakses 3 maret 2020. diakses dari <https://www.halloriau.com/read-dprd-pekanbaru-126501-2020-03-03-pemko-diminta-tanggap-cegah-virus-corona-di-pekanbaru.html>

Guest, J. L., del Rio, C., & Sanchez, T. (2020). The three steps needed to end the COVID-19 pandemic: Bold public health leadership, rapid innovations, and courageous political will. *JMIR Public Health and Surveillance*, 6(2), 1–4. <https://doi.org/10.2196/19043>

Ilesanmi, O. S., Afolabi, A. A., Akande, A., Raji, T., & Mohammed, A. (2021). Infection Prevention and Control during COVID-19 Pandemic: Realities from Healthcare Workers in a North Central State in Nigeria. *Epidemiology and Infection*, 149(e15), 1–9. <https://doi.org/10.1017/S0950268821000017>

Habtewold, B. W., & Bilail, O. H. (2019). *Political will: necessary but not sufficient for control of an outbreak of acute watery diarrhoea in the*. 8(1), 35–39. <https://doi.org/10.15406/mojph.2019.08.00281>

Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/jne.v2i1.5316>

Halloriau.com. (2020a). *Diskes Pekanbaru Keluhkan Keterbatasan ADP untuk Tanggulangi Wabah Corona*. Diakses 23 maret 2020. diakses dari <https://www.halloriau.com/read->

Infoanggaran.com. (2020). *Menyelisik Ruang Gelap Anggaran Covid-19 Di Riau*. Diakses 25 September 2020. diakses dari <https://infoanggaran.com/detail/menyelisik-ruang-gelap-anggaran-covid19-di-riau>

- Kabar24.bisnis.com. (2020). *DPR: Anggaran Covid-19 Terlalu Fokus pada Pemulihan Ekonomi Ketimbang Kesehatan*. Diakses 2 September 2020. diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200902/15/1286477/dpr-anggaran-covid-19-terlalu-fokus-pada-pemulihan-ekonomi-ketimbang-kesehatan>
- Katakabar.com. (2020). *Besok Pemko Pekanbaru Terapkan PSBB*. Diakses 16 April 2020. diakses dari <https://katakabar.com/berita/baca/besok-pemko-pekanbaru-terapkan-psbb>
- Lassa, J. A., Surjan, A., Caballero-Anthony, M., & Fisher, R. (2019). Measuring political will: An index of commitment to disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 34(November 2018), 64–74. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.11.006>
- Martínez, R & Kukutschka, B (2014). *Building Political Will Topic Guide Compiled by the Anti-Corruption Helpdesk Transparency International is a global movement with one vision : a world*. https://www.transparency.org/file_s/content/corruptionqas/Topic_Guide-_Political_Will.pdf
- Mediacenter.riau.go.id. (2020). *Pekanbaru Bubarkan Gugus Tugas, Ganti dengan Satgas Penanganan Covid-19*. Diakses 25 September 2020. diakses dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/57508/pekanbaru-bubarkan-gugus-tugas-ganti-dengan-s.html>
- Mediaindonesia.com. (2020). *WHO: Infeksi Covid-19 Tumbuh Secara Eksponensial* Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/300598-who-infeksi-covid-19-tumbuh-secara-eksponensial>. Diakses 21 Mei 2020. diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/300598-who-infeksi-covid-19-tumbuh-secara-eksponensial>
- News.detik.com. (2020). *Pemkot Pekanbaru Kesal Warga Cuek soal Corona: Ada yang Percaya Konspirasi*. Diakses 17 September 2020. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5176883/pemkot-pekanbaru-kesal-warga-cuek-soal-corona-ada-yang-percaya-konspirasi>
- Okezone.com. (2020). *Gelombang Kedua Covid-19 bisa terjadi di Indonesia*. Diakses 21 Mei 2020. diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/06/02/337/2223251/gelombang-kedua-covid-19-bisa-terjadi-di-indonesia>
- Pekanbaru.go.id. (2020a). *Disdik Perpanjang Belajar di Rumah*

- hingga 23 April 2020*. Diakses 16 April 2020. diakses dari <https://pekanbaru.go.id/p/news/di-sdik-perpanjang-belajar-di-rumah-hingga-23-april-2020>
- Pekanbaru.go.id. (2020b). *Pemko Terapkan PSBM di Empat Kecamatan*. Diakses 29 September 2020. diakses dari <https://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-terapkan-psbm-di-empat-kecamatan>
- Pekanbaru.go.id. (2020c). *PSBM Empat Kecamatan Dihentikan, Pemko Terapkan PHB*. Diakses 15 Oktober 2020. diakses dari <https://pekanbaru.go.id/p/news/psbm-empat-kecamatan-dihentikan-pemko-terapkan-phb>
- Pikiran-rakyat.com. (2020). *Pemerintah Indonesia Dinilai Tidak Konsisten, Pernyataan Para Pejabat Bikin Masyarakat Kebingungan*. Diakses 8 Mei 2020. diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01379017/pemerintah-indonesia-dinilai-tidak-konsisten-pernyataan-para-pejabat-bikin-masyarakat-kebingungan>
- Ppc-19.pekanbaru.go.id. (2020). *Info Grafis Sebaran Kasus Di Pekanbaru*. Diakses 21 Mei 2020. diakses dari <https://ppc-19.pekanbaru.go.id/halaman/info-grafis>
- Republika.co.id. (2020a). *Daerah Minta Pusat Konsisten dalam Penanganan Covid-19*. Diakses 21 Mei 2020. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qalqio1325000/daerah-minta-pusat-konsisten-dalam-penanganan-covid19>
- Republika.co.id. (2020b). *Pekanbaru Mulai Terapkan New Normal Tanpa Petunjuk Teknis*. Diakses 27 Mei 2021. diakses dari <https://republika.co.id/berita/qazt22382/pekanbaru-mulai-terapkan-new-normal-tanpa-petunjuk-teknis>
- Riau.suara.com. (2020). *PHB Pekanbaru Dimulai Besok, Warga Bandel Denda Hingga Rp 1 Juta*. Diakses 20 Oktober 2020. diakses dari <https://riau.suara.com/read/2020/10/20/075816/phb-pekanbaru-dimulai-besok-warga-bandel-denda-hingga-rp-1-juta>
- Riaukontras.com. (2020). *Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran*. Diakses 21 Mei 2020. diakses dari <http://www.riaukontras.com/read-501-16628-2020-05-21-bansos-covid19-kota-pekanbaru-diduga-di-korupsi-hingga-3-miliar-satu-kali-penyaluran.html>
- Riauonline.co.id. (2020a). *Sosialisasi New Normal Kurang, Zulfi Khawatir Pasien Covid-19 Naik*

- Drastis*. Diakses 2 Juni 2020. diakses dari <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2020/06/02/sosialisasi-new-normal-kurang-zulfi-khawatir-pasien-covid-19-naik-drastis>
- Riauonline.co.id. (2020b). *Sosialisasi PSBB Pekanbaru Lamban, Pemko Harus Libatkan Publik*. Diakses 15 April 2020. diakses dari <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2020/04/15/sosialisasi-psbb-pekanbaru-lamban-pemko-harus-libatkan-publik>
- Riaupos.jawapos.com. (2020a). *WABAH CORONA PSBB Diperpanjang, Masyarakat Belum Paham*. Diakses 29 April 2020. diakses dari <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/29/04/2020/230400/psbb-diperpanjang-masyarakat-belum-paham.html>
- Riaupos.jawapos.com. (2020b). *Warga Diimbau Perbanyak Aktivitas Dalam Rumah Riau Siaga Darurat Satu Bulan*. Diakses 16 Maret 2021. diakses dari <https://riaupos.jawapos.com/riau/17/03/2020/227192/riau-siaga-darurat-satu-bulan.html>
- Shiffman, J. (2003). Generating political will for safe motherhood in Indonesia. *Social Science and Medicine*, 56(6), 1197–1207. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(02\)00119-3](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00119-3)
- Shumba, K., Nyamaruze, P., Nyambuya, P. ., & Meyer-Weitz. (2020). Politicising the COVID-19 Pandemic in Zimbabwe: Implications for Public Health and Governance. *African Journal of Governance and Development*, 9(1.1), 271–286.
- Sonora.id. (2020). *PSBM Gagal, Kini PHB Kembali Dijalankan di Kota Pekanbaru*. Diakses 22 Oktober 2020. diakses dari <https://www.sonora.id/read/422393569/psbm-gagal-kini-phb-kembali-dijalankan-di-kota-pekanbaru>
- Tempo.co. (2020a). *Gelombang Kedua Covid-19, China Lockdown Beijing*. Diakses 10 Juni 2021. diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1354033/pedagang-pasar-tradisional-positif-covid-19-bertambah-di-jakarta>
- Tempo.co. (2020b). *Virus Corona 20 Kali Lebih Mematikan daripada Virus Flu*. Diakses 10 Juni 2021. diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1309609/virus-corona-20-kali-lebih-mematikan-daripada-virus-flu>
- Ugarte, C., Alcala, P. A., & Mauvernay, J. (2018). Political will, coordination, and planning: Key components for strengthening national response to public health emergencies and disasters in Latin

- America and the caribbean countries. *American Journal of Public Health*, 108, S209–S211. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304639>
- Velsor, E. Van, Turregano, C., Adams, B., & Fleenor, J. (2009). *Creating Tomorrow ' s Government Leaders An Overview of Top Leadership Challenges And How They Can Be Addressed.*
- Zonapekan.com. (2020). *Perwako Sudah Terbit, Pekanbaru Resmi Terapkan Perilaku Hidup Baru.* Diakses 10 Juni 2021. diakses dari <https://zonapekan.com/news/cetak/2154/>